

Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik

Gun Gun Heryanto*

*Universitas Islam Jakarta, Jakarta

ARTICLE INFO

Keywords:
Political Relations, Public Participation, Mass Media and Social Media

email:
gun_heryanto@yahoo.com

ABSTRACT

Phenomenon of governance Joko Widodo (Jokowi) is about a model of political relations between actors. Interaction takes place between the ruling elite (state actors) and the community (society actors). Therefore, it is difficult to avoid when the then competition between the interests of the ruling elite and society become dominant in the political process, both at the decision-making and policy implementation. In the exercise of power, it is used to turn up and gained four patterns of political interaction that is complementary patterns, accommodate, compete with and replace. Is asymmetrical relationship model that is not too clear who the opponent and friend. Political cooperation often take the option koopsi the cause potential swingers in the coalition. This, due to the lack of a dominant winning party in the middle of a strong fragmented multiparty system (a highly fragmented Multiparty system) so that all parties would prefer a consensus democracy. In the midst of the crush various issues, public participation is often expressed through mass media and social media. This can be understood as non-conventional forms of political participation..

Banyaknya satu fenomena menarik tentang penyelenggaraan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah perihal model hubungan politik antar aktor. Interaksi berlangsung antara elite penguasa dan masyarakat. Oleh karenanya, sulit dihindari bila kemudian kompetisi kepentingan antar elite penguasa dan masyarakat menjadi dominan dalam proses politik, baik saat pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan. Dalam praktik kekuasaan, sangat biasa muncul dan menguat empat pola interaksi politik yakni pola melengkapi, mengakomodasi, menyaingi dan menggantikan. Model hubungan bersifat asimetris yakni tidak terlalu jelas siapa lawan dan kawan. Kerjasama politik seringkali mengambil pilihan koopsi yang menyebabkan potensi gonta-ganti pasangan dalam koalisi. Hal ini, disebabkan ketiadaan partai pemenang dominan di tengah sistem multipartai yang terfragmentasi kuat sehingga semua pihak lebih memilih demokrasi konsensus. Di tengah himpitan beragam persoalan, publik seringkali mengekspresikan partisipasinya lewat media massa dan media sosial. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik non konvensional.

Pendahuluan

Diskusi seputar model hubungan politik dalam aras pemetaan penyelenggaraan pemerintahan, senantiasa berjalan dinamis dan sangat dipengaruhi oleh proses berdemokrasi (William, 2002) yang terjadi baik dalam skala lokal, regional maupun global. Secara prinsip, inti dari permasalahan yang dihadapi sistem demokrasi adalah penjaminan, pengoptimalan serta penyeimbang kebebasan dan kesetaraan (Buhlmann et.al, 2012). Lain halnya menurut pendapat Verschoor (2015) yang mengatakan bahwa demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Hal ini mengacu pada bentuk kekuasaan politik di mana orang-orang secara kolektif memerintah diri mereka sendiri dengan berpartisipasi sebagai individu yang bebas dan sama dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, demokrasi menekankan pada aspek pengambilan keputusan, baik dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan dari atas ke bawah (*top-down*) yang dihasilkan dari partisipasi, kesetaraan, pendekatan, nilai-nilai birokrasi dan hirarkis (Denhardt & Denhardt, 2006)

Tocqueville (Usman dan Priyono, 2014) membedakan dua aspek demokratisasi, yakni: sistem demokratik dan etos demokratik. Pendapat lain tentang aspek demokrasi, dikemukakan oleh Verschoor (2015) bahwa tiga aspek dari ide demokrasi adalah (1) hubungan kolektif pemerintahan dan kebaikan bersama, (2) kondisi sah kolektif pemerintahan sendiri, dan (3) nilai otonomi individu. Kiranya distingsi dari abad ke-19 ini masih sangat relevan untuk membaca lanskap politik Indonesia kekinian. Sistem demokratik adalah prosedur demokratik dan manajemen pemerintahan demokratik di dalamnya termasuk sistem hukum demokratik, birokrasi pemerintahan demokratik, dan proses legislasi keputusan-keputusan publik secara demokratik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Urbinati dan Warren (2008), dalam teori demokrasi, hasil dari kebijakan atau keputusan publik merupakan prinsip utama dalam partisipasi publik, karena publik dapat merasakan manfaat dari keputusan tersebut serta memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Sedangkan etos demokratik adalah formasi nilai-nilai demokratik di masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat warga (*civil society*) yang kokoh. Kumar dan Seligman (Himmelboim, 2011) mengutarakan bahwa teori civil society telah dikembangkan untuk tiga abad terakhir, dalam ranah individu dan masyarakat 'keinginan untuk dibebaskan dari tirani politik, yang menekankan kebebasan dan bergaul sebagai penting bagi masyarakat sipil. Dari sudut pandang komunikasi, para ilmuwan sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan media dalam

transisi atau demokratisasi masyarakat mendorong permintaan warga untuk demokrasi dengan mengajarkan norma-norma demokrasi, nilai-nilai, dan praktik dan dengan menciptakan ruang bagi ekspresi politik yang terbuka (Mattes & Bratton, 2007; Nisbet, 2008, Schmitt-Beck & Voltmer, 2007; Nisbet, et al., 2012;)

Jalannya demokratisasi Indonesia selama enam belas tahun tidak banyak menghasilkan perubahan-perubahan signifikan. Di awal reformasi, Presiden Habibie (Mei 1998-Oktober 1999) telah mengambil inisiatif untuk membebaskan para tahanan politik, membuka ruang kebebasan pers, serta menghapus formasi pembatasan partai-partai politik. Yang juga di eranya dwifungsi militer dihapus. Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Oktober 1999-Juli 2001) melanjutkan aspek penguatan aspek sosio-kultural masyarakat warga dengan komitmennya yang kuat untuk menggalang saling pengertian di antara kelompok-kelompok religius dan etnis yang berbeda-beda di dalam negeri. Kemudian melahirkan Mahkamah Konstitusi, beberapa kali amandemen UUD 1945, pemilu presiden secara langsung, melahirkan lembaga anti korupsi dll, merupakan prestasi yang jangan dianggap remeh untuk sebuah negara yang selama lebih dari tiga dasawarsa berada di dalam cengkraman rezim otoriter. Rezim otoriter tidak hanya mencegah partisipasi individu dengan meningkatkan hukuman untuk perbedaan pendapat, tetapi juga mengontrol infrastruktur komunikatif dengan cara menyulitkan warga untuk mengkoordinasikan pertentangan pendapat secara efektif atau mengekspresikan perbedaan pendapat mereka di ruang publik (Tufekci & Wilson, 2012)

Tapi jika kita hadapkan dengan dua aspek demokrasi ala Tocqueville, hasil-hasil demokratisasi tersebut, belum diimbangi dengan formasi etos demokratik di masyarakat-warga. Tentu, demokratisasi tidak hanya diukur dari semata-mata sukses pergantian rezim lewat pemilu demokratik. Tetapi, penguatan masyarakat-warga menjadi hal penting lainnya untuk menciptakan etos demokratik. Kita bisa melihat secara kasat mata bagaimana kekuatan-kekuatan nyata di belakang panggung pemilu yang tidak diperhitungkan, dan salah satu di antaranya adalah mereka yang melakukan politik uang untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan "*predatoris*" mereka setelah memenangkan pemilu (Usman dan Priyono, 2014). Hal tersebut, mengisyaratkan bahwa demokrasi dianggap "konsolidasi" ketika demokratisasi "sebagai aturan" yang dilembagakan dalam badan pemerintah dan mereka muncul konsensus

normatif antara elit politik dan masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan ini (Bratton et al., 2005).

Setelah mengalami kungkungan “kolonialisasi birokrasi” kita malah menuju ke “kolonialisasi pasar” yang ditandai dengan menguatnya “uang”. Di era Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) telah terjadi liberalisasi pasar sebagai preferensi politik, pemerintah SBY membuka peluang bagi apa yang disebut Habermas “kolonialisasi” pasar atas berbagai wilayah kemasyarakatan, seperti pendidikan, pelayanan-pelayanan publik, media massa. Sehingga, krisis solidaritas tidak terelakkan. Akibatnya, sekarang birokrasi diperlemah demi kepentingan-kepentingan pasar dan pemasaran. Meminjam teori sistem Niklas Luhmann, di era SBY bukanlah “solidaritas” melainkan “uang” yang menjadi kode bagi hubungan-hubungan sosial (Usman dan Priyono, 2014).

Jika kita merujuk pada dua kriteria demokrasi, yakni kebebasan dan kesetaraan, kita akan menemukan bahwa kebebasan pada era pasca-Soeharto memang lebih besar daripada era Soeharto karena rezim otoriter membatasi kebebasan. Namun kebebasan yang lebih besar itu tidak menghasilkan kesetaraan, melainkan ketimpangan yang justru lebih besar. Demikian halnya saat memasuki rezim Jokowi. Harapan yang tinggi dari masyarakat pada sosok Jokowi mulai memudar seiring kuatnya kepentingan politik kekuasaan dari elite parpol penyokong Jokowi saat pemilu presiden lalu. Melewati satu tahun pemerintahan, menjadi fase menentukan bagi perjalanan Kabinet Kerja di bawah Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Sejumlah persoalan yang mengemuka di awal pembentukan pemerintahan baru terutama soal hubungan politik Jokowi dengan partai-partai di dalam maupun di luar kekuasaan, kerap dibaca sebagai variabel yang berpengaruh signifikan pada pelambatan laju Kabinet Kerja. Kini, alasan tersebut tak lagi relevan, mengingat pola hubungan antagonis antara koalisi partai politik sudah mencair sehingga sukses tidaknya pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kerja nyata yang dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat banyak.

Laporan *The Economist Intelligence Unit* menyimpulkan bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi di dunia sejak 2008. Meminjam istilah dari Olvera (2010) saat menggambarkan kondisi demokrasi di Meksiko, saat ini sedang terjadi resesi demokrasi (*democratic decline*). Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi, baik dari pemantapan kapasitas institusi demokrasi maupun kematangan budaya politik,

sehingga demokrasi tidak membawa panji-panji demokrasi, suatu keadaan yang disebut sebagai *elusive democracy* oleh Olvera (2010), saat menggambarkan kondisi demokrasi di Meksiko.

Di tengah resesi demokrasi itulah telaah tentang relasi kuasa antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti penting. Bagaimanakah model hubungan antar aktor di tengah kekuatan yang terfragmentasi seperti sekarang? Siapa saja aktor dominan dalam penyelenggaraan kekuasaan? Seperti apa gambaran partisipasi publik dalam beragam kanal komunikasi terutama media massa dan media sosial? Media sosial media dapat mengubah prinsip-prinsip utama dari tindakan kolektif dan dalam melakukannya, membuat kerentanan baru dari rezim otoriter (Bimber, Flanagin, & Stohl, 2005).

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (Woodside, 2010) penelitian studi kasus merupakan kajian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam hal kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Sedangkan menurut Eisenhardt (Woodside, 2010) studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada satu waktu untuk memahami dan menjelaskan dinamika.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Diskrepansi: Antara Harapan dan Realitas

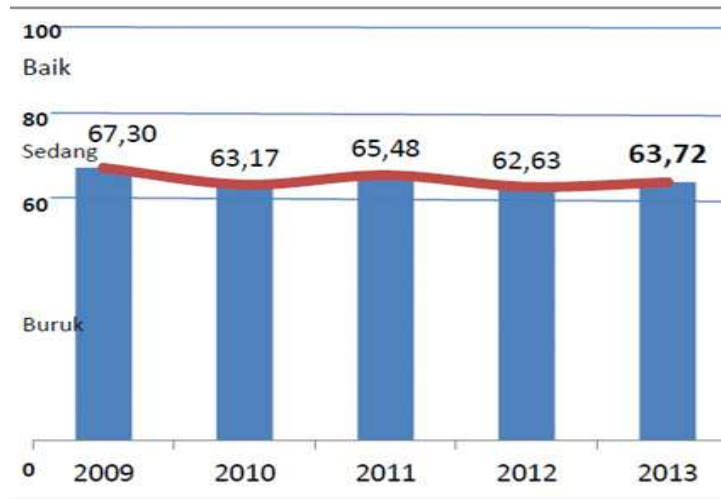
Tak dimungkiri, salah satu harapan awal reformasi adalah perbaikan kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pengukuran oleh Freedom House mengategorikan Indonesia sebagai negara yang bebas secara penuh, kendati kecenderungan demokrasi beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi bahkan penurunan. Sementara *The Economist* lebih tegas mengategorikan Indonesia ke dalam demokrasi yang masih “cacat” (*flawed democracy*).

Gismar dan Hidayat (2010) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dari proses reformasi yang berlangsung sejak 1998 adalah karena gerakan perubahan lebih berfokus pada upaya membangun dan memperbaiki institusi negara (*state institutions*). Sementara, upaya untuk membangun dan memperkuat kapasitas negara (*state capacity*) cenderung tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Konsekuensinya, “kehadiran negara” dalam kehidupan sehari-hari (*state in practice*) menjadi samar-samar atau bahkan dalam beberapa kasus cenderung “absen”.

Jika mengkaji data, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional 2013 sebesar 63,72 dari skala 0-100, angka ini naik 1,09 poin dibanding dengan IDI nasional 2012 sebesar 62,63. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori sedang. Perkembangan IDI

dari 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,30; 2010 sebesar 63,17, 2011 sebesar 65,48, 2012 sebesar 62,63 dan 2013 sebesar 63,72). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Indonesia berdasarkan penghitungan Indeks sejak 2009 hingga 2013 tetap masih berada pada kategori sedang.

Diagram 1. Perkembangan IDI Nasional 2009-2013 (BPS, 2014)



Dari data di atas nampak kondisi demokrasi Indonesia berada dalam posisi sedang. Melajunya perbaikan-perbaikan cenderung melambat. Terutama dalam tiga hal mendasar, yang dijadikan objek kajian dalam penyusunan IDI (Indeks Demokrasi Indo-

nesia) yakni kebebasan sipil (*civil liberty*), hak politik (*political rights*), dan kelembagaan demokrasi (*institutions of democracy*).

Tabel 1. Variabel dan Indikator pada Aspek kebebasan Sipil (IDI, 2012)

Variabel	Indikator
Kebebasan berkumpul dan berserikat	1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul berserikat
	2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
Kebebasan berpendapat	3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
	4. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
Kebebasan berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya
	6. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
	7. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
Kebebasan dari diskriminasi	8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
	9. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
	10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya

Tabel 2. Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik

Variabel	Indikator
Hak memilih dan dipilih	1. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat 2. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih 3. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) 4. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>) 5. Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi
Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	6. Jumlah demonstran/mogok yang bersifat kekerasan 7. Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 3. Variabel dan Indikator pada Aspek Kelembagaan Demokrasi

Variabel	Indikator
Pemilu yang bebas dan adil	1. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 2. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam perhitungan suara
Peran DPRD	3. Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita 4. Jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan 5. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
Peran Partai Politik	6. Kegiatan kederisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu 7. Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah	8. Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 9. Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif
Peran Peradilan yang independen	10. Keputusan hakim yang kontroversial 11. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa dan polisi

Dari variabel dan indikator di atas inilah gambaran posisi demokrasi Indonesia sekarang ini:

Tabel 4. Perkembangan Skor Variabel IDI Nasional 2012-2013

No	Nama Variabel	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebebasan berkumpul dan berserikat	80,28	86,06
2	Kebebasan berpendapat	61,86	69,15
3	Kebebasan berkeyakinan	83,79	81,13
4	Kebebasan dari diskriminasi	84,70	86,22
5	Hak memilih dan dipilih	50,26	50,31
6	Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	44,52	45,61
7	Pemilu yang bebas dan adil	87,67	87,67
8	Peran DPRD	35,53	36,62
9	Peran Partai Politik	69,52	53,51
10	Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah	88,58	88,58
11	Peran Peradilan yang independen	82,42	83,94

Dari data di atas, nampak bahwa partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masih kurang. Peran partai politik mengalami penurunan, peran DPRD juga masih kurang. Meski-

pun ada yang juga menggembarakan misalnya soal kebebasan berkumpul dan berserikat serta Pemilu yang bebas dan adil.

Demokrasi dalam banyak momentum, meminjam istilah Hardiman hanya melahirkan kaum predatoris oligarkis, akibat ide representasi dalam kenyataan politik bahwa mereka yang berhasil meraih kuasa legitim lewat pemilu dapat menyelewengkan kekuasaan tersebut. Bagaimana demokrasi yang mengandalkan representasi dan peranan partai-partai hanya menghasilkan oligarki kekuasaan karena para wakil di parlemen *de facto* membangun suatu sistem otonom yang imun terhadap aspirasi publik yang mereka wakili. Aspirasi publik jelas lebih kompleks daripada aspirasi-aspirasi privat kalangan-kalangan tertentu, seperti perusahaan-perusahaan bisnis, dan elit-elit politik. Maka partai-partai dan lembaga-lembaga perwakilan sebagai sebuah sistem cenderung mereduksi kompleksitas dengan menghubungkan diri pada aspirasi-aspirasi privat kalangan-kalangan tersebut.

Selama kita berpuas diri dengan sistem perwakilan dan kepartaian, demokrasi tidak akan menjadi milik *demos*, melainkan akan diselewengkan demi kepentingan-kepentingan *predatoris oligarki*. Karena itu demokrasi liberal akan melahirkan atau menyediakan panggung bagi segelintir orang yang mengklaim

diri mereka mewakili orang banyak. Atas nama "efisiensi" relasi antar politisi dan kaum oligarki bisnis-politik tampak memudahkan pengambilan keputusan. Efisiensi dalam hubungan-hubungan oligarkis hanya mungkin terjadi dalam selubung *kleptokratik* karena oligarki tidak akan meraih legitimasi publik dan beroperasi hanya dengan menyembunyikan kepentingannya dibalik legitimasi publik.

Dengan demikian *check and balance* tidak hanya berlangsung oleh lembaga-lembaga pemerintah dan DPR, melainkan juga antara sistem politik dan masyarakat warga dalam bentuk *public use of reason* dalam ruang publik. Memang kita sedang menghadapi oligarki warisan lama yang terus bercokol selama enam belas tahun ini-masih bertahan dalam demokrasi, kenyataan tersebut menyiratkan bukan sekedar masih lemahnya masyarakat warga, melainkan juga-meminjam istilah Hannah Arendt dalam *The Origin of Totalitarianism* - semacam konspirasi antara massa dan elit untuk mengkhianati tujuan demokratisasi. Untuk memberi gambaran lebih utuh mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, berikut ini kami paparkan beberapa data IDI di beberapa provinsi:

Tabel 5. Perkembangan IDI Berdasarkan Aspek dan Provinsi 2012-2013

Provinsi (1)	IDI 2013				IDI 2012			
	IDI (2)	Aspek 1 (3)	Aspek 2 (4)	Aspek 3 (5)	IDI (6)	Aspek 1 (7)	Aspek 2 (8)	Aspek 3 (9)
Aceh	63,56	71,78	48,59	76,97	54,02	60,16	47,16	57,21
Sumatera Utara	58,80	73,65	49,50	54,90	58,51	73,85	49,82	53,01
Sumatera Barat	54,11	54,88	38,97	77,17	60,82	57,10	50,85	81,32
Riau	68,37	77,71	52,19	82,32	67,00	80,21	47,16	81,89
Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34	68,81	86,23	46,60	82,18
Sumatera Selatan	67,12	91,45	50,32	63,22	73,17	93,26	55,21	76,42
Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28	61,70	77,76	48,93	61,79
Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58	72,26	94,14	50,60	79,16
Kep. Bangka Belitung	68,79	85,16	50,60	77,09	69,37	83,09	51,21	80,97
Kep. Riau	66,50	80,08	49,63	76,21	65,61	82,68	49,98	68,95
DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69	77,72	88,11	62,52	88,81
Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05	57,05	65,93	46,58	62,51
Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89	63,79	75,03	46,29	77,46
DIY Yogyakarta	72,36	90,78	50,65	83,69	72,96	87,39	55,52	82,52
Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10	54,99	80,97	36,17	52,22
Banten	69,79	81,39	51,03	85,00	65,29	79,20	51,03	70,42
Bali	72,22	92,55	52,87	77,38	71,75	94,18	45,00	86,01
Nusa Tenggara Barat	57,22	59,68	49,60	66,24	57,97	58,31	49,60	70,85
Nusa Tenggara Timur	73,29	95,59	58,83	68,23	72,67	91,06	50,89	84,15
Kalimantan Barat	67,52	97,54	49,36	58,61	65,38	92,37	37,18	76,23
Kalimantan Tengah	64,15	81,89	50,69	63,21	65,78	68,44	51,05	85,82

Provinsi	IDI 2013				IDI 2012			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kalimantan Selatan	63,71	58,03	56,35	82,54	61,13	49,51	52,59	89,33
Kalimantan Timur	68,13	92,14	55,36	58,20	71,23	97,16	51,69	69,68
Sulawesi Utara	73,11	92,44	62,55	65,56	76,50	95,64	58,65	80,77
Sulawesi Tengah	64,50	90,03	36,78	76,44	64,97	93,43	37,65	72,55
Sulawesi Selatan	65,20	81,30	50,62	68,10	68,55	87,07	43,74	84,66
Sulawesi Tenggara	52,61	84,32	28,95	50,32	57,26	91,39	29,50	58,44
Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22	59,37	73,25	50,76	55,59
Sulawesi Barat	64,02	88,51	44,05	64,94	63,65	88,67	35,92	76,22
Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95	59,68	76,05	45,08	62,27
Maluku Utara	64,06	83,67	48,94	63,40	66,83	88,15	50,13	66,55
Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26	65,70	94,42	45,74	61,27
Papua	60,92	90,21	31,37	71,01	60,71	91,11	32,99	66,50
Indonesia	63,72	79,00	46,25	72,24	62,63	77,94	46,33	69,28

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik

Model Hubungan Politik Antar Aktor: Studi Kasus Rezim Jokowi

Di antara karakteristik utama dari pergeseran pola *state-society relation* (relasi antara negara dan masyarakat) pada periode transisi menuju demokrasi pasca Soeharto adalah adanya perluasan peran masyarakat. Namun demikian, perluasan partisipasi masyarakat tersebut berimplikasi pada semakin transparannya kompetisi kepentingan antar-elite masyarakat. Kecenderungan ini mudah dipahami karena *society* dalam arti *civil society* itu sendiri belum sepenuhnya siap berperan. Konsekuensinya, peluang partisipasi masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi telah lebih banyak ditangkap dan dimanfaatkan oleh para elite masyarakat. Mereka inilah yang telah berperan mewakili masyarakat, atau mengklaim diri mewakili masyarakat, dalam berhadapan dengan negara (Gismar dan Hidayat, 2010).

Dengan demikian, pola interaksi antara *state* dan *society* pada periode transisi menuju demokrasi lebih merupakan interaksi elite penguasa (*state actors*) dan elite masyarakat (*society actors*). Oleh karenanya, sulit dihindari bila kemudian kompetisi kepentingan antar-elite penguasa dan antar-elite masyarakat telah mendominasi proses politik, baik dalam pengambilan keputusan maupun pada tahap implementasi kebijakan. Sementara pada rejim demokrasi, pola interaksi antara *state* dan *society* sangat dinamis. Atau dengan kata lain, terjadi suatu interaksi dua arah antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), baik pada proses pengambilan keputusan (*policy making*)

maupun pada tahap implementasi kebijakan (*policy implementation*) (Smith, 1995, Marsh and Stoker, 1995).

Memasuki tahun 2015, muncul harapan di banyak orang kehidupan bangsa Indonesia akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Gegap gempitanya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden, telah menyedot perhatian publik sepanjang tahun 2014, bahkan sebagian besar masyarakat larut dalam euforia dukungan. Salah satu dampaknya, ruang publik kita disesaki informasi politik yang berorientasi pada perebutan 'kuasa opini'. Menurut Keane (1998) bahwa sepanjang tahun ini bisa kita sebut sebagai fase keberlimpahan komunikasi (*communicative abundance*), terutama informasi politik yang setiap saat menerpa khalayak.

Realitas sosial politik diwarnai kebisingan, keterbelahan dukungan, ekspresi persaingan dan keberlimpahan hasrat kekuasaan. Wajar, karena banyak pihak menyadari rangkaian tahapan demokrasi elektoral di tahun 2014 lalu telah memberi ruang aktualnya panggung para politisi dengan beragam motif kekuasaannya. Hampir seluruh energi masyarakat tahun ini tersedot pada penyelenggaraan pemilu legislatif dan mencapai titik kulminasinya pada pemilu presiden. Praktik komunikasi dominannya ditandai dengan pertarungan opini di ruang publik baik di media mainstream (tv, koran, radio, media online dll) maupun di media sosial. Sebaran informasi yang masif, banyak diarahkan pada upaya memperkuat legitimasi sekaligus mendelegitimasi pihak lain. Apakah praktik komunikasi politik sepanjang

tahun 2014 tersebut telah memberi penguatan pada komunikasi deliberatif di masyarakat?

Pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi sorotan beragam pihak. Menurut asumsi Helmke dan Levitsky (2004) akan muncul dan menguat empat pola interaksi politik di tahun 2015 yakni pola melengkapi (*complementary*), mengakomodasi (*accommodating*), menyaingi (*competing*), dan menggantikan (*substitutive*). Setiap pola tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

Di prediksi, model hubungan asimetris akan memberi warna dominan dalam bangunan komunikasi politik para aktor. Tidak terlalu jelas siapa lawan dan kawan dalam gelanggang permainan. Pola kerjasama politik pun sangat mungkin mengambil pilihan koopsi yang menyebabkan potensi gontaganti pasangan selalu terbuka. Hal ini disebabkan ketiadaan partai pemenang dominan di tengah multipartai yang terfragmentasi kuat (*a highly fragmented multiparty system*) sehingga semua pihak lebih memilih demokrasi konsensus. Harapan kita, tentu saja semua elemen bangsa mau dan mampu menyadari pentingnya merawat persistensi demokrasi guna memastikan kita melaju ke arah yang tepat dengan bermartabat.

Arend Lijhart, menyebutkan dalam masyarakat majemuk yang tidak ada partai dominannya, cenderung akan menggunakan demokrasi model konsensus (Lizphart, 1999). Koalisi untuk membangun pemerintahan, merupakan bagian dari konsensus tersebut. Sejak Pemilu pertama pascareformasi hingga sekarang model konsensus inilah yang menjadi pilihan para pihak yang dimandati kekuasaan. Hal ini juga sangat mungkin masih mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di era Jokowi-JK.

Harapan publik sesungguhnya sederhana meski untuk merealisasikannya butuh kerja luar biasa! Harapan pada pemimpin terpilih adalah bonum commune yakni prinsip mengedepankan kepentingan umum. Jokowi-JK harus optimal bekerja dan mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan sistem yang bisa dirasakan kemanfaatannya untuk memperbaiki persoalan-persoalan nyata di masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, toleransi, dan lain-lain. Istilah kerja bukan lagi diposisikan sebagai "mantra" penarik suara, melainkan wajib mewujudkan dalam sejumlah indikator capaian nyata untuk memperbaiki bopeng-bopeng wajah kekuasaan yang kerap dirias dan menampilkan dasamuka politik citra.

Paling tidak ada tiga tantangan utama tahun ini dan ke depan. Pertama, jalan keluar dari kekakuan kubu kekuasaan. Zona elite yang terbelah di Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akankah tetap menjadi simbol egoisme para elite dan menjadi labirin kekuasaan? Tantangan ini jika tak teratasi akan menjadi jebakan retrogresi politik yakni pemburukan dan penurunan kualitas politik akibat ulah para aktor dan parpol yang bekerja semata-mata mendapatkan jatah kekuasaan. Jokowi-JK dan jajaran kabinetnya tahun 2015 dan ke depan akan melalui proses dialektika relasional.

Baxter dan Montgomery (1996) menggambarkan dialektika relasional sebagai situasi yang dicirikan oleh ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif. Berbagai isu bergulir dan menjadi dinamika sekaligus indikator untuk mengukur performa Jokowi-JK. Impresi publik di awal pemerintahan Jokowi-JK menjadi sangat penting bagi perjalanan pemerintahan karena hal ini akan beririsan dengan harapan, dukungan, sekaligus keterjagaan legitimasi yang telah dikantonginya usai Pemilu. Sebaliknya jika pertarungan ini gagal, maka persoalan berat menghadang di depan mata, kontrol kekuatan non pemerintah di DPR sangat kuat dan dukungan publik akan melemah.

Kedua, tantangan untuk menghadirkan komunikasi deliberatif. Kata deliberatif berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Komunikasi bersifat deliberatif jika prosesnya mampu menghadirkan konsultasi publik, atau diskursus publik. Ada upaya meningkatkan intensitas partisipasi warga dalam proses pembentukan aspirasi dan opini. Proses ini, merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi deliberatif yang berprinsip *Regierung der Regierten* (pemerintahan oleh yang diperintah). Jangan sampai elit berkuasa berpikir, dirinya adalah kekuasaan dan apapun yang menjadi keinginan serta kepentingannya menjadi hukum yang harus ditaati dan dijalankan tanpa memberi ruang aspirasi dan partisipasi.

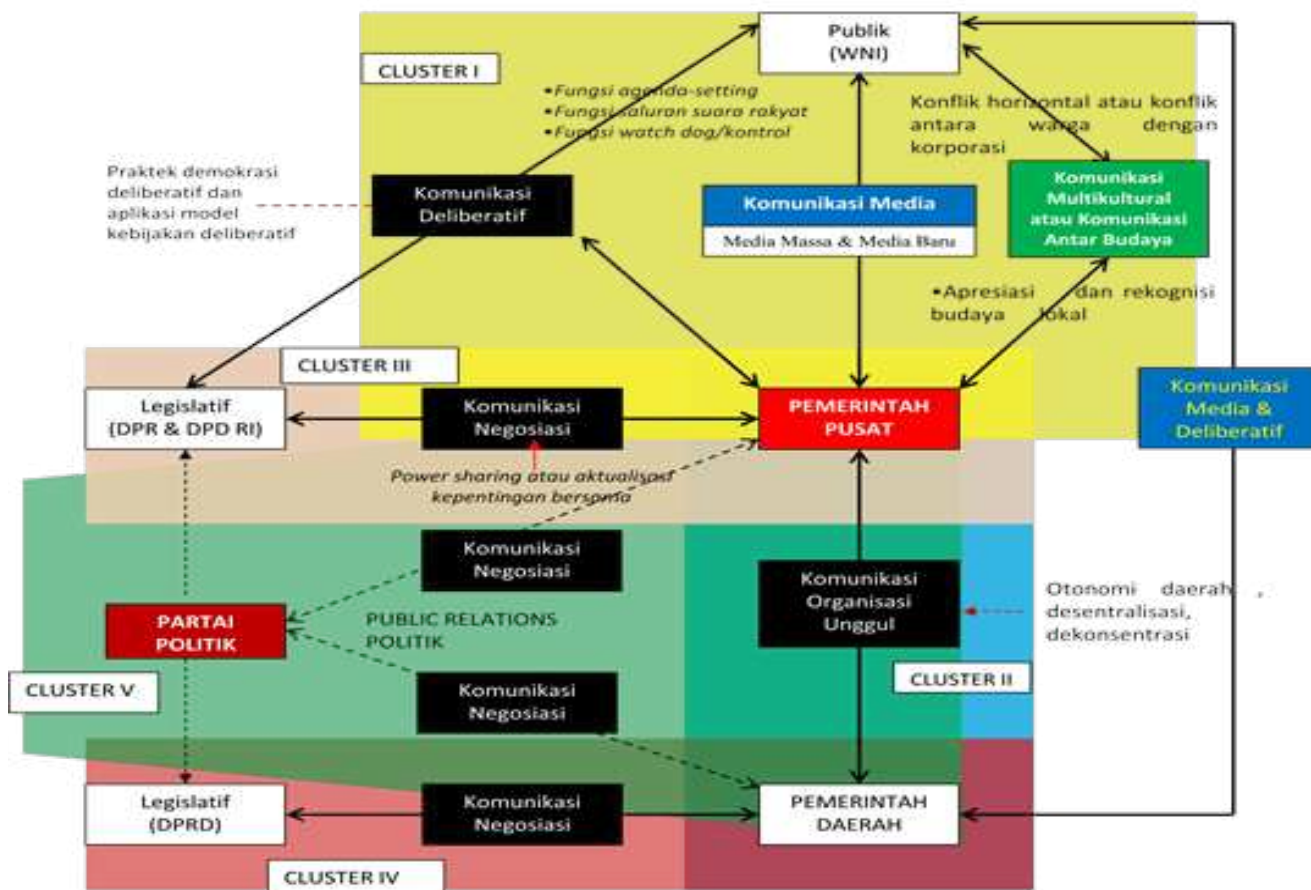
Ketiga, menghadirkan produktivitas kinerja. Pada akhirnya, publik akan mengkonfirmasi janji dengan realisasi kerjanya. "Jika ingkar, maka kuasa pasti tak lagi mengakar! Kekuasaan yang tercerabut dari akar harapan publiknya, ibarat membangun istana di atas pasir". Dari sekian banyak peristiwa politik yang melibatkan banyak aktor dengan segala kepentingannya, satu hal yang seyogianya menjadi perhatian kita bersama bahwa demokrasi bukan semata urusan kompetisi lima tahunan. Sangat penting menem-

patkan perjalanan demokrasi kita sepanjang tahun ini dalam perspektif konsolidasi demokrasi bukan semata-mata kontestasi pragmatis sesaat.

Kalau kita identifikasi, sejumlah aktor yang akan dominan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-JK adalah: (1) Megawati Soekarnoputri, karena menjadi veto player di PDIP, dan sekaligus menjadi salah satu sosok yang akan diperhatikan dalam pemosisian Jokowi sepanjang menjadi pemimpin. (2) Surya Paloh, karena teridentifikasi memiliki koneksi sangat erat dengan Megawati dan partainya turut menjadi bagian dalam partai berkuasa. (3) Para pengusaha yang menjadi "investor" naiknya Jokowi-JK ke tampuk kekuasaan, misalnya Sofyan Wanandi, James Riyadi dll. (4). Jusuf Kalla, karena pengalaman dan jejaring politiknya berpotensi menjadi orang menentukan dalam penyeleng-

garan rezim Jokowi. (5) Prabowo Subianto, karena memiliki sumberdaya politik cukup menentukan di luar kekuasaan yang sangat mungkin menjadi salah satu titik keseimbangan Jokowi di tengah tekanan. (5). Demokrat, karena berposisi sebagai kekuatan di tengah. Tentu, posisi *swing* Demokrat dengan SBY sebagai *veto player*-nya suatu waktu akan menjadi bagian penting dalam skema ZOPA (zone of possible agreement) rezim Jokowi. (6) Aktor-aktor non kekuasaan yang dominan mempengaruhi wacana dan tindakan di ruang publik, misalnya para aktivis, media, netizens dll.

Jika digambarkan maka proses hubungan penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-JK ini akan berada dalam interaksi dengan cluster-cluster berikut ini:



Gambar 1. Interaksi penyelenggaraan pemerintahan (Hasil Penelitian FISIP UI (2013))

Partisipasi Publik: Studi di Media Massa dan Media Sosial

Partisipasi politik dari publik merupakan suatu masalah yang penting, sehingga akhir-akhir ini banyak dikaji terutama dalam hubungannya dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Apakah yang dimaksud dengan partisipasi politik itu? Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) dan lain-lain. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau ang-

gota parlemen dan sebagainya. (Budiharjo, 2005). Menurut Verba & Nie, Verba, Schlozman, & Brady (McLeod et.al, 1999) secara umum, partisipasi politik lokal harus dianggap sebagai proses dinamis daripada hasil sistem statis. Artinya, sebagai sebuah konsep normatif yang disebabkan oleh partisipasi politik lokal tidak merata dalam waktu suatu masyarakat tertentu.

Media Demokratis-Partisipan?

Salah satu bentuk partisipasi politik, tentu saja bisa dilakukan publik melalui kanal informasi yang tersedia saat ini, yakni media massa dan media sosial. Untuk melengkapi kajian soal partisipasi publik melalui kanal media massa dan media sosial ini, sepatutnya kita kaji terlebih dahulu konteks kesejarahan media massa dalam dinamika politik nasional.

Awalnya industri media cetaklah yang meretas jalan bagi pertumbuhan industri media di Indonesia. Walaupun tidak menghasilkan laba yang banyak dibandingkan industri lain pada tahun 1980-an, industri media cetak menempati posisi penting secara politis sebagai instrumen penyalur informasi sekaligus sarana kontrol (Sudibyo dan Patria, 2013) yang kemudian akhir tahun 1980-an, mulai berkembangnya industri pertelevisian Indonesia yang sebagian besar dikendalikan oleh kroni-kroni Soeharto, media tumbuh sangat mencolok sebagai corong kekuatan Orde Baru. Hampir semua platform media cetak, radio, televisi dan film menjadi alat kontrol Orde Baru.

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) merupakan stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, pemilik awalnya adalah salah seorang anak Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo. Pada tahun 1990 muncul SCTV pemilik awalnya adalah Henry Pribadi (pengusaha yang dekat dengan keluarga cendana) dan Sudwikatmono. Menantu Soeharto, Halimah Trihatmojo, tercatat sebagai salah satu pemegang saham di SCTV. Stasiun swasta ketiga adalah Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh anak Soeharto, Mba Tutut melalui PT Citra Lamtoro Gung Persada yang mengudara menggunakan fasilitas transmisi TVRI. Pada tahun 1995 muncul Indosiar sebagai stasiun televisi swasta keempat. Pemiliknya adalah Salim Group, kelompok bisnis milik Liem Sioe Liong@konglomerat Tionghoa dan sahabat Soeharto. Stasiun swasta kelima adalah ANTV yang dimiliki oleh Bakrie Group (konglomerat bisnis dengan jejaring politik cukup kuat) dan Agung Laksono, salah seorang petinggi Golongan Karya (Golkar).

Dalam kerangkeng rezim Orde Baru kendali bisnis media penyiaran oleh keluarga cendana tak hanya dimaksudkan hanya untuk mengeruk laba, melainkan juga untuk menopang kepentingan rezim. Kepemilikan media akan menentukan liputan media pada Pemilu tahun 1997, yang kesemuanya berpihak kepada Golkar termasuk pemberitaan TVRI. Inilah awal sinergi kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik yang membentuk alur industri penyiaran melalui media televisi di Indonesia sampai sekarang.

Dalam konteks inilah, Etos demokratik harusnya diperkuat untuk meminimalisir kekuatan kaum *predatoris-oligarkis* dengan memaksimalkan peran media massa. Memang pengaruh yang dimiliki media pada demokrasi merupakan salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan dari hubungan antara media dan politik. Ciri dari sebuah negara yang demokratis adalah kebebasan pers. Tapi bagaimana media bertindak sebagai pengawal demokrasi? Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting: mendorong debat publik dan keterlibatan politik dan bertindak sebagai pengawas publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya media merupakan agen-agen pendidikan politik.

Akan tetapi kritikan juga tidak bisa dimungkiri terkait kemampuan media untuk mendorong pemerintahan demokratis yang efektif. Pertama, media kerap melontarkan pandangan-pandangan politik yang bias. Bias politik muncul dari opini-opini dan nilai-nilai dari para editor, wartawan, bahkan pemilik media. Apalagi politisi yang juga memiliki media dan ikut dalam arus kontestasi pemilu. Kedua, media massa tidak memiliki akuntabilitas publik, ia menjadi contoh klasik dari kekuasaan tanpa tanggungjawab. Ketiga soal independensi media dan terkungkung dalam "zona rating".

Tak bisa dimungkiri bahwa arus global kapitalisme membawa jauh, di mana peningkatan konsentrasi kepemilikan media bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Yang kemudian memengaruhi ruang redaksi dan praktik jurnalistik. Kita bisa lihat ada dua belas pemain media yang mengembangkan bisnis medianyanya. Misal, Hary Tanoesoedibyo memiliki group MNC, pernah gabung ke partai Nasdem dan pecah kongsi, kemudian bergabung ke Hanura, mendeklarasikan calon wakil presiden berpasangan dengan Wiranto dari partai Hanura. HT juga telah mendeklarasikan partainya sendiri yakni Partai Perindo. Dahlan Iskan pemilik Jawa Pos Group, Jacob Utama pemilik kelompok Kompas Gramedia (kompas tv), Erik

Thohir pemilik Mahaka Media Group, Sariatmadja Family pemilik dari SCTV dan Indosiar, Chairul Tanjung pemilik Transtv dan Trans7, Aburizal Bakrie pemilik tvOne dan ANTV telah menggunakan medianya sebagai alat politik, Surya Paloh pemilik Metro tv juga secara terang-terangan menggunakan medianya untuk publisitas kegiatan politiknya, Adiguna pemilik MRA Media, Pia Alisjahbana pemilik Femina Group, Yayasan Tempo pemilik Tempo inti Media, Lippo Group pemilik Beritasatu Media Holding.

Kelompok-kelompok ini telah menjadi pemilik utama dari semua jenis media karena strategi ekspansinya. Tetapi ekspansi kepemilikan media tidak dibarengi dengan konten yang beragam (*diversity of content*), malah seragam. Sen dan Hill mengatakan, pada akhir Orde Baru, organisasi media menjadi entitas-entitas ekonomi yang didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan pembaca dan pemirsa. Tak pelak, unsur ekonomi dan bias politik membayangi media massa Indonesia. Pun demikian, ruang publik yang dibuka oleh media demokratis secara otomatis mengerut saat rasionalitas birokrasi atau modal mengambil alih fungsi, sistem kerja dan orientasi produksi media. Ancaman nyata ruang publik demokratis di Indonesia sesungguhnya datang serentak dari negara dan modal dalam bentuk simbiosis kekuasaan politik-birokratis (Sen dan Hill, 2000).

Akibatnya, media kerap kali menyempitkan perspektif politik yang ditampilkan. McChesney (1999) bahwa konsentrasi kekuasaan di tengah oligopoli korporat yang terintegrasi secara vertikal telah mengancam arus bebas informasi dan opini yang berbeda yang justru amat vital bagi daya hidup masyarakat demokratis. Artinya diperlukan agenda bagi reformasi media secara struktural yang akan memungkinkan penyebaran praktik-praktik sosial dan nilai-nilai demokratis.

Doyle berpendapat, konsentrasi media di tangan beberapa pihak memiliki dua konsekuensi penting: penurunan pluralisme media dan penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pemilik media (Haryanto, 2014). Hrvatin dan Petkovic dalam survei kepemilikan media yang terkonsentrasi dan dampaknya terhadap kemerdekaan media di Eropa Tengah dan Selatan, menyatakan bahwa pemilik media berada dalam posisi memengaruhi isi media, dan kemungkinan mereka mengerahkan pengaruh tersebut yang akan mengakibatkan pembatasan dan kebebasan jurnalistik (Haryanto, 2014). Pasalnya, pemilik me-

dia kerap mendikte isi media, baik secara politik, ideologi, kepentingan pribadi maupun komersial. Jadi pasca Soeharto, konsentrasi kepemilikan media di tangan beberapa kelompok media besar telah menciptakan situasi di mana media berkolusi dengan kepentingan bisnis dan kepentingan politik. Pada akhirnya, publikasi cenderung lebih seperti *newsletter* kelompok tertentu dibandingkan media independen dan netral, yang memberitakan secara kritis orang-orang yang memegang kekuasaan ekonomi dan politik.

Ruang Publik Baru di Media Sosial

Kehadiran ruang publik baru ini seperti membawa angin harapan untuk menembus sisi-sisi dunia yang semakin kental dengan persekongkolan kekuasaan politik dan uang. Harapan itu muncul dari kemajuan teknologi media sosial digital yang kemudian akan memperkuat demokrasi. Manuel Castell (2012) menyatakan media sosial merupakan ruang-ruang otonomi yang berjejaring di luar jangkauan pemerintah maupun korporasi-korporasi yang memonopoli saluran-saluran komunikasi untuk memertahankan kekuasaan mereka. Meminjam istilah Van Dijk (Hamid, 2014) bahwa kita hidup di dalam "dunia yang terhubung" (*connected world*), atau "jaman berjejaring" (*the age of networking*), "jaring-jaring manusia" (*human web*), dan "masyarakat internet" (*a web society*).

Angin harapan ini membawa kaula muda di kota-kota besar Indonesia berperan aktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi internet dan media sosial untuk tujuan sosial yang positif, termasuk sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan institusi negara. Misalnya, kita tentu ingat Gerakan Koin untuk Prita di Facebook, penyelamatan ketua KPK (cicak vs buaya) dari jeratan Polri, kisah The Arab Spring menjadi penanda bahwa teknologi menjadi pemanfaatan untuk perubahan masyarakat dan sistem politik. Tentu kehadiran teknologi ini membawa kita pada *new public sphere* yang terlepas dari dominasi dan hegemoni penguasa. Contoh ini bisa dilihat sebagai peluang untuk memperkuat partisipasi politik demokrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial digital.

Kita bisa menggambarkan keterlibatan warga dalam sosial kemasyarakatan dan situasi media secara umum. Pertama, terjadinya diskursus antar warga, hadirnya partisipasi warga serta keterlibatan politik warga tinggi sebagai refleksi dari demokrasi yang sehat. Kedua, mengumpulkan opini-opini publik. Sebagaimana karakteristik masyarakat era pasca-industrial, urbanisasi dan proliferasi (percepatan)

komunikasi massa telah mengarahkan pemerintah, politikus, dan media massa untuk mengandalkan pengumpulan pendapat publik. Ketiga, meningkatnya sinisme publik terhadap politik dan media massa, sehingga menumbuhkan keaktifan warga dalam persoalan-persoalan politik.

Hal menarik dari paparan Zizi A. Papacharissi di dalam *Private Sphere: Democracy in a Digital Age* yang mengambil contoh kesuksesan Obama memanfaatkan media sosial dan memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat. Kesuksesan Obama merupakan contoh adanya 'relasi mistis' (*mystical connection*) antara teknologi dan demokrasi (Papacharissi, 2010). Di saat suatu medium komunikasi baru lahir, maka muncul pertanyaan sejauh mana medium itu berpengaruh pada tata pemerintahan yang demokratik? Diskursus ini dekerangkai polaritas antara *utopian* dan *dystopian*: yakni proyeksi berupa harapan-harapan besar dan ketakutan-ketakutan yang muncul karena kekinian teknologi.

Pun demikian kesuksesan tersebut menjalar ke Indonesia, bagaimana Jokowi menggunakan media sosial untuk mendongkrak popularitasnya baik dunia *online* maupun di dunia *offline*. Perluasan ruang publik-politik melalui aktivisme media sosial di Indonesia mulia menimbulkan perhatian luas. Indonesia secara keseluruhan sudah mengendap penyakit internetisasi. Bayangkan jumlah pengguna internet berlipat-lipat ganda dari 2 juta pada tahun 2000 menjadi 55 juta pada 2012⁹ menempati urutan keempat di Asia setelah RRT, India, dan Jepang. Perkembangan ini tidak lepas dari membengkaknya kelas menengah Indonesia yang pada tahun 2014 mencapai lebih 100 juta orang dan diperkirakan akan mencapai 150 juta orang, Indonesia telah menjadi negara kelas menengah terbesar di Asia Tenggara.

Netizen Indonesia sudah terbentuk secara signifikan. Pengguna Facebook di Indonesia masuk peringkat keempat skala dunia dan pengguna twitter terbesar kelima. Jakarta bahkan disebut-sebut sebagai ibukota twitter, karena menjadi kota yang memiliki akun twitter terbanyak dibandingkan kota-kota lain di dunia. Munculnya istilah 'kultwit' (kuliah twitter) yang sering dilakoni oleh para akademisi maupun politisi. Di Indonesia, politisi mulai banyak menggunakan perangkat digital dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan konstituen atau khalayak luas. Ridwan Kamil @ridwankamil Walikota Bandung memanfaatkan ruang virtual untuk memperbincangkan masalah dan perbaikan kota. Ganjar Pranowo @GanjarPranowo Gubernur Jawa Tengah

memanfaatkan media sosial untuk mencerna aspirasi publik. Banyak pula aktivis sosial memanfaatkan media sosial digital untuk terlibat dalam diskursus publik menyangkut isu-isu yang selama ini mereka kerjakan secara offline. Oleh karenanya, media sosial digital menjadi ruang aktivisme sosial yang menyentuh proses-proses politik demokratisasi. Gerakan SaveKPK, dan lahirnya petisi online Change.org, semakin menjelaskan media sosial digital memiliki potensi besar untuk diterjemahkan secara langsung jadi suara publik untuk terciptanya partisipasi politik.

Pengalaman Change.org: Studi Kasus

Change.org memulai sebuah platform online yang terbuka untuk digunakan sebagai alat memulai sebuah petisi, menggalang dukungan, dan memenangkan suatu kampanye sosial yang diinginkan. Usman Hamid sebagai Co-Founder Change.org Indonesia melihat gerakan publik virtual semakin terpolakan, mapan dan massif.

Kisah dari gerakan sosial di Amerika Serikat dan Eropa. Warga Amerika melakukan protes besar-besaran, akibat pemerintah Amerika Serikat keliru membiarkan sistem liberalisasi ekonomi berjalan tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap masyarakat. Pemerintah menggelontorkan dana talangan untuk perusahaan-perusahaan besar di Amerika pada tahun 2008. Dampaknya, keuangan negara semakin memburuk akibat utang yang terus membengkak. Peristiwa ini membuat warga Amerika melakukan demonstrasi besar dan mengepung kantor-kantor perbankan, perusahaan keuangan, dan korporasi multinasional yang beroperasi di kawasan Wall Street, Manhattan, New York. Gerakan ini yang kemudian dikenal sebagai gerakan anti-Wall Street atau Accupy Wall Street.

Kisah dari Timur Tengah, gejolak revolusi negara-negara Arab yang dikenal dengan The Arab Spring, yang secara nyata memanfaatkan media digital untuk memulai revolusi. Sejak 18 Desember 2010, telah terjadi gelombang protes besar di Tunisia dan Mesir, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah dan Yaman. Protes besar juga terjadi di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko dan Oman. Komunikasi yang digunakan dengan memanfaatkan beragam media sosial seperti Facebook, twitter, You Tube dan Skype untuk mengorganisasi kekuatan sosial dan dukungan massa. Jatuhnya penguasa Mesir dan Libya seakan menjadi simbol pergerakan sosial masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Di Indonesia gagasan petisi online yang dimotori oleh Usman Hamid dan Arief Aziz dalam ruang

Change.org sangat membantu mengubah kebijakan pemerintah dan perusahaan swasta. Petisi online pertama di Indonesia dibuat oleh Melanie Subono seorang penyanyi rock yang peduli terhadap nasib TKW Indonesia. Kasus bermula, saat itu Maftuh Basyuni selaku ketua satgas TKI membuat pernyataan tidak pantas dan mencederai perasaan TKW. Petisi ini membuahkan hasil dengan mengantongi 5.254 tanda tangan. Selanjutnya petisi dibuat oleh Cucu Saidah penyandang disabilitas, kaki kecil sehingga menggunakan kursi roda. Dia melakukan petisi pada Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia yang kerap kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan harus menandatangani surat "sakit". Petisi ini mendapat dukungan 1.761 tanda tangan, sehingga pihak Garuda Indonesia menghapus surat "sakit" yang diberikan penyandang disabilitas. Kemudian Petisi Trian Airlangga. Seorang tunanetra yang hendak membuka rekening tabungan di BCA mendapat perlakuan diskriminatif dan kurang baik. Mendapat dukungan tanda tangan sebanyak 4.189 dan mengubah kebijakan BCA untuk orang tunanetra membuka tabungan. Catatan keberhasilan ini tentu harus diapresiasi untuk terus mengawal kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun perusahaan swasta dengan pemanfaatan media sosial dan teknologi internet.

Petisi online di atas memberikan gambaran pada kita bahwa kemajuan internet di Indonesia telah sedemikian rupa digunakan warganya untuk melakukan mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil guna menghadapi kekuatan politik maupun ekonomi hegemonik. Meminjam ungkapan Manuel Castells kehadiran internet bisa menyerukan idealisme baru dari kekuatan jejaring emosi, kemarahan, atau harapan yang terbagi dan tersebar luas pada jejaring sosial.

Bangkitnya *Civil Society*?

Dukungan nyata yang dilakukan *civil society* terhadap penyelenggaraan pemilu secara langsung, menjaga KPK agar tidak dikriminalisasi oleh Polri di dunia online maupun offline petanda bahwa *civil society* terusik dengan penyalahgunaan kekuasaan. Menjelaskan ketidakpuasan publik terhadap efektivitas pemerintah yang akan membawa pada mundurnya demokrasi.

Misal, pada november 2010, seorang politisi Golkar mengatakan bahwa KPU yang dijalankan oleh partai politik akan menghentikan "penyalahgunaan" yang sudah demikian memuakkan masyarakat (Politician on Election, 2010). Artinya ada kelompok elite konservatif yang dengan menggunakan argu-

men birokratnya melakukan pelemahan demokrasi yang sudah terbangun. Memang masyarakat sipil Indonesia sangat dinamis pasca-1998, peran mereka sangat penting dalam demokrasi. Peran mereka sangat penting dalam menjaga agar Indonesia tidak mengalami resesi demokrasi.

Tetapi ironisnya indeks partisipasi politik warga kecil, tercatat pada tahun 2012 sekitar 44,52% sedikit meningkat pada tahun 2013 sekitar 45,61%. Itu artinya, warga belum terlalu terlibat dalam proses deliberasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. *Civil society* hanya menjadi kelompok penekan di luar kekuasaan dengan memanfaatkan media sosial digital.

Nugroho menunjukkan adanya empat proses penggunaan media sosial dalam proses demokratisasi: pertama, internet sebagai sumber informasi, dengan adanya internet masyarakat menjadi melek-informasi. Kedua, media sosial berbasis internet adalah medium menjanjikan potensi interaktivitas yang paling tinggi di antara para anggotanya dibanding media massa. Ketiga, partisipasi muncul dari keterlibatan warga negara untuk mewujudkan kepentingan umum. Ada tiga jenis partisipasi; (a) partisipasi kebijakan untuk mendukung atau menentang kebijakan, (b) partisipasi politik, memengaruhi proses pembuatan keputusan politik atau terlibat dalam pembuatan agenda dan (c) partisipasi sosial, untuk meningkatkan modal sosial seperti solidaritas atau petisi publik. Keempat, desentralisasi maksudnya adalah untuk membawa pemerintah lebih dekat ke rakyat dalam rangka memudahkan warga negara terlibat dalam praktik demokrasi (Hamid, 2014).

Kesimpulan

Partisipasi politik masyarakat memang harus terus diupayakan bangkit dan menjadi kekuatan pengontrol terutama dalam bergeraknya penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rezim berkuasa termasuk rezim Jokowi, punya potensi "dibajak" oleh sekelompok elite politisi yang berkolaborasi dengan para pengusaha dalam menikmati kekuasaan. Media massa dan media sosial harus bisa dioptimalkan sebagai katalisator partisipasi publik. Mengembalikan marwah media massa sebagai entitas sosial yang memainkan peran pengontrol dan media sosial sebagai ruang ekspresi yang bebas dominasi pasar dan intervensi negara.

Referensi

- Baxter, L.A. and Monthgomery, B.M. (1996). *Relating: Dialogues and Dialectics*. New York: Guilford Press.
- Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik No. 55/07/Th. XVII, 4 Juli 2014.
- Bimber, B., Flanagan, A. J., & Stohl, C. (2005). Reconceptualizing collective action in the contemporary media environment. *Communication Theory*. Vol. 15. No. 4, pp 365.
- Bratton, M., Mattes, R., & Gyimah-Boadi, E. (2005). *Public opinion, democracy, and market reform in Africa*. New York. NY: Cambridge University Press.
- Castell, Manuel (2012). *The Network of Outrage and Hope: Social Movement in the Internet Age*. UK: Polity, Cambridge.
- Denhardt, Robert B., & Janet V. Denhardt. (2006). *Public administration: An action orientation*, 5th ed. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
- Gismar, A.M. dan Syarif Hidayat (2010). *Reformasi Setengah Matang*. Jakarta. Mizan.
- Hamid, Usman dan AE Priyono (2014) (Ed). *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kelompok Penerbit Gramedia (KPG).
- Hamid, Veronica. (2014). *Angin Harapan Demokrasi Digital, Nostalgia Demokrasi Klasik, Transformasi Ruang Publik, dan Politisasi Media Sosial*. Jakarta: KPG.
- Haryanto, Ignatius (2014). *Monopoli Media dan Runtuhnya Independensi Jurnalistik*. Jakarta: KPG.
- Helmke, G., and Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative politics: A Research Agenda. *Perspective on Politics*. Vol. 2 No. 4.
- Himmelboim, Itai. (2011). Civil Society and Online Political Discourse: The Network Structure of Unrestricted Discussions. *Communication Research*. Vol. 38. No. 5, pp. 634–659.
- Indeks Demokrasi Indonesia (2012). *Diskrepansi Antara Tuntutan dan Perilaku Demokrasi*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Keane, John. (1998, Augustus 28). *The Humbling of the Intellectual, Public life in the Era of Communicative Abundance*. In Times Literary Supplement.
- Lizphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Have. CT: Yale University Press.
- Mattes, R., & Bratton, M. (2007). Learning about democracy in Africa: Awareness, performance and experience. *American Journal of Political Science*, Vol. 51, pp. 192–217.
- McChesney, R. W (1999). *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- McLeod, Jack M. et.al. (1999). Community, Communication, and Participation: The Role of Mass Media and Interpersonal Discussion in Local Political Participation. *Political Communication*. Vol. 16, pp. 315–336.
- Nisbet, E. C. (2008). Media use, democratic citizenship, and communication gaps in developing democracy. *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 20, pp. 454–482.
- Nisbet, Erik C., et al., (2012). Internet Use and Democratic Demands: A Multinational, Multilevel Model of Internet Use and Citizen Attitudes About Democracy. *Journal of Communication*.
- Olvera, Alberto J. (2010), *The Elusive Democrac-Political Parties, Democratic Institutions and Civil Society in Mexico/Latin American*. Research Fellow- Special Issues.
- Papacharissi, Lihat Zizi A. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. UK: Polity, Cambridge.
- Schmitt-Beck, R., & Voltmer, K. (2007). The mass media in third wave democracies: Gravediggers or seedsmen of democratic consolidation? In R. Gunther, H-J. Puhle, & J. R. Montero (Eds.), *Democracy, intermediation, and voting on four continents* (pp. 75–134). Oxford, England: Oxford University Press.
- Sen, Krisna dan David T Hill (2000). *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Melbourne : Oxford University Press.

- Sudibyo, Agus dan Nezar Patria (2013). Ditempa Pertarungan Modal Industri Pertelevision di Indonesia Pasca-Otoritarianisme, *Prisma*. Vol. 32. No. 1.
- Tufekci, Zeynep dan Christopher Wilson. (2012). Social Media and the Decision to Participate in Political Protest: Observations From Tahrir Square. *Journal of Communication*.
- Urbinati, Nadia, and Mark E. Warren. (2008). The concept of representation in contemporary democratic theory. *Annual Review of Political Science*. Vol. 11, pp. 387–412.
- Verschoor, Marco. (2015). The democratic boundary problem and social contract theory. *European Journal of Political Theory*. Vol. , No. , pp. 1–20.
- William. (2002). *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*. Routledge, p. 6-8.
- Woodside, Arch G. (2010). *Case Study Research: Theory, Methods, Practice*. UK : Emerald Group Publishing Limited.

